



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG EKONOMI KREATIF
KOMISI X DPR RI KE KOTA CIREBON JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 18 S.D. 20 NOVEMBER 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa
3. UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
4. UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5. UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
6. UU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
8. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib
9. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 1 November 2022

B. Maksud dan Tujuan

Maksud kunjungan kerja ini adalah melakukan pengawasan bidang ekonomi kreatif. Adapun tujuannya secara umum yaitu:

1. Memahami perkembangan dan kemajuan ekonomi kreatif di daerah sebagai salah satu sektor yang berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi pada masa sekarang dan mendatang.
2. Memperkuat pemahaman tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan pembangunan, penyelenggaraan, dan pengelolaan ekonomi kreatif.
3. Memperkuat pemahaman tentang posisi ekonomi kreatif sebagai bidang yang memerlukan penanganan secara komprehensif.

Sementara tujuan khususnya yaitu mengetahui dan mendapatkan data mengenai implementasi Undang-Undang Ekonomi Kreatif, khususnya dalam hal pembentukan Badan Layanan Umum Ekraf di Instansi daerah.

C. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang EKonomi Kreatif Komisi X DPR RI ke Kota Cirebon ini dipimpin oleh H, Muhamad Nur Purnamasidi dari Fraksi Partai Golongan Karya, Turut mendampingi dari Kememparekraf/Baparekraf RI, yaitu Muhammad Neil El Himam, M.S.c selaku Deputy Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, serta Bayu Aji, S.E., selaku Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

D. Metode Kerja

Metode kerja yang digunakan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Cirebon yaitu:

1. Pertemuan dengan Wakil Walikota Cirebon yang dihadiri oleh:
 - a. Pimpinan DPRD Kota Cirebon
 - b. Kepala Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata
 - c. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
 - d. Komite Ekonomi Kreatif Kota Cirebon;
 - e. Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Unswagati Cirebon
 - f. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon
 - g. Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi UNU Cirebon
 - h. Perbankan di Kota Cirebon (BI, Bank Jabar dan BRI).
 - i. Komunitas atau Pelaku Ekraf di Kota Cirebon
 - j. Rumah Kreatif BUMN Kota Cirebon;
 - k. Kreatif Forum @Kota Cirebon.
2. Kunjungan ke Gedung Galeri Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Walikota Cirebon, melalui Wakil Walikota Cirebon, Eti Herawati, dalam sambutan tertulisnya menyampaikan bahwa Pemkot Cirebon memahami bahwa era revolusi industri 4.0 membuat ekonomi kreatif menjadi isu strategis dalam memenangkan persaingan global yang membutuhkan inovasi dan kreativitas melalui kapitalisasi ide kreatif. Di Jawa Barat, jumlah usaha kreatif sebanyak 1.504.103 usaha, yang mayoritas diisi oleh subsektor kuliner, fesyen, dan kriya. Tiga subsektor ini cukup banyak banyak juga ada di Kota Cirebon. Potensi ini tentu saja perlu didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan dikelola dengan berbagai strategi yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. Selain itu, Ekraf mengedepankan inovasi dan kreativitas yang perlu didukung kejelasan aturan HKI. Ekraf perlu dikembangkan melalui persemaian bibit-bibit unggul kaum milenial. Besarnya potensi Ekraf, perlu ditransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru. Dengan komitmen tinggi, Ekraf dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Cirebon.
2. Selain menyampaikan sambutan tertulis dari Walikota Cirebon, Wakil Walikota Cirebon juga menyampaikan beberapa hal antara lain, bahwa Kota Cirebon memiliki kraton (bahkan 4 kraton ada di Kota Cirebon), namun destinasi Makam Gunung Jati ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Sentra pengrajin dan produsen batik ada di Kabupaten Cirebon, sedangkan toko dan distributor batik ada di Kota Cirebon. Keadaan ini perlu kerja sama, terutama dalam program dan kegiatan, agar Kabupaten dan Kota, dapat mengembangkan wisata dan ekraf lebih masimal. Kerjasama ini lebih kuat jika ada peran Provinsi. Selain itu Kota Cirebon juga bercita-cita memiliki Technopark, sebagaimana kota lainnya.

3. Kepala Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata, Agus Sukmawijaya, menyampaikan mengenai gambaran umum kebudayaan dan pariwisata Kota Cirebon sebagai berikut:
- Potensi kebudayaan yang dimiliki oleh Kota Cirebon adalah: (1) 58 Cagar Budaya (sesuai SK Wali Kota No. 19 Th. 2001); (2) 41 Objek diduga Cagar Budaya; (3) 197 Sanggar Seni; (4) 14 Warisan Budaya Tak Benda (sesuai SK Gubernur dan Menteri; dan (5) 223 Karya Budaya.
 - Potensi wisata yang dimiliki Kota Cirebon adalah (1) 61 Hotel (Bintang dan Non Bintang); (2) 166 Rumah Makan, Restoran, Café; (3) 21 Objek Wisata; (4) 18 Tempat Hiburan; (5) 260 Pelaku Ekonomi Kreatif.
 - Aksesibilitas yang dimiliki oleh Kota Cirebon sangat lengkap, yaitu (1) Terminal Tipe A, (2) Stasiun Cirebon; (3) Travel; (4) Pelabuhan; dan (5) Bandara.
 - Program Percepatan Disbudpar, adalah sebagai berikut:

Usulan Pembuatan Museum	Sedina Nyerbon
<ul style="list-style-type: none"> • Gedung Negara. • Balai Kota Cirebon. • Gedung Bundar. 	Penggunaan Bahasa, Kostum, Kuliner, Musik Cirebon di Setiap Hari Kamis.
Kampung Arab	Even Mingguan
<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi: Kelurahan Panjunan. • Kluster Kuliner dan Seni Budaya–RW 04. • Kluster Religi dan Gerabah – RW 05. • Kluster Pusat Oleh-Oleh RW – 08. 	<ul style="list-style-type: none"> • Malem Mingguan Ning Bale Kota. • Taman Pedati Gede (BAT). • Festival Pekalipan. • Keraton Kacirebonan.
Literasi Budaya dan Profesi	Sektor Ekraf
<ul style="list-style-type: none"> • Sasaran: Siswa PAUD, TK, SD. • Objek Kunjungan: Cagar Budaya dan Institusi Pemerintahan, TNI/POLRI dan Institusi Lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan Kampung di Setiap Setiap Kelurahan. • Cirebon Creative Mall. • Cirebon's Corner. • Checkin Snack.

- Dukungan Anggaran dari APBD Kota Cirebon Tahun 2022 untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp. 681.712.600, yang terdiri dari:
 - APBD 2022 Murni sebesar Rp. 381.712.600,
 - APBD 2022 Perubahan sebesar Rp. 300.000.000,
 - Plafon Anggaran Tahun 2023 untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ditetapkan sebesar Rp. 472.299.700.
 - Kota Cirebon merupakan kota yang menghubungkan Jakarta dan Jawa. Seluruh moda transportasi singgah di Kota Cirebon. Dukungan tersebut membuat potensi Cirebon sangat besar.
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, ling Daiman, S.IP. menyampaikan penjelasan bahwa Pemkot melakukan banyak kegiatan kreatif, antara lain Mall (melayani Anda Lewat Layanan UKM), Festifal Pekalipan (festifal Pusat Kuliner dan Aksi Kesenian), Sirine Intel (Sinergi Ekonomi IKM, Ritel dan Hotel), Potret Kita (Pojok Kreatif Asah Talenta), Perwira H. God (pelatigan Wiraswasta Go Digital), Duta PKL (Duta Usaha Tata PKL), dan festifal UMKM.

5. Perwakilan Komite Ekonomi Kreatif Kota Cirebon, Regina Afrianti, menyampaikan beberapa informasi antara lain tentang beberapa kegiatan yang dilakukan, antara lain Tabalong (Taman Belajar Cikalong), dan mengembangkan Cirebon Smart City. Disampaikan juga, bahwa Komite Ekonomi Kreatif sudah dibentuk dan sudah ada SK nya dari Walikota, namun belum dilantik.

6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati, menyampaikan beberapa data dan catatan, antara lain:
 - a. Peran akademisi, peneliti dan perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif, adalah:
 - Peningkatan kapasitas dan mengarahkan potensi minat mahasiswa terhadap ekonomi kreatif.
 - Penelitian bidang seni kreatif, transfer *knowledge* bagi pembatik, dan produk lainnya
 - Pengabdian masyarakat, bekerjasama dengan pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi.
 - b. Catatan mengenai penelitian, pengabdian yang dilakukan kampus, antara lain, sebagai berikut:
 - Beberapa dosen melakukan penelitian dibidang industri kreatif Batik, bahan baku batik dan penciptaan karya terbaru batik, serta edukasi.
 - Pengabdian Masyarakat/PKM dan KKN Tematik, yaitu peningkatan seni tari topeng dan seni pembuatan topeng, bentuknya suport dan partisipasi dalam kompetisi tari topeng milik seniman Tari topeng.
 - c. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kampus mengembangkan kegiatan KKN melalui program *one village one product*, maupun marketing digital.
 - d. Penyediaan SDM oleh perguruan tinggi yang mampu mengembangkan industri kreatif, antara lain dilakukan melalui:
 - Perguruan tinggi memiliki prodi Seni Pertunjukan (SEJUK) di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, sebagai upaya untuk pengembangan ekonomi Kreatif sesuai program Kementrian dan Pemerintah Pusat.
 - Menyediakan UKM (Unit Kegiatan mahasiswa), seni tari, paduan suara, Musik tradisional dan band yang sudah ada.
 - Menyediakan tempat penyelenggaraan perlombaan seni, paduan suara setiap tahun, dengan peserta dari Perguruan Tinggi lain dan Siswa SMA sekitar Ciayumajakuning.
 - Mengirimkan dan mendukung sepenuhnya mahasiswa sebagai peserta, untuk mengikuti kompetisi yang diadakan, baik di dalam daerah maupun diluar daerah.
 - Mendukung mahasiswa yang memiliki bakat seni untuk mengikuti aktifitas seni apa pun, baik bersifat non-komersial maupun komersial.
 - Mengadakan Pertunjukan seni dengan pertunjukan musik dengan artis-artis nasional seperti, Charlie Viratale, Nadine Hamidah, Budi Doremi, Risky Febian. Dan mahasiswa tampil menunjukkan bakatnya sebagai band pembuka.
 - Setiap Wisuda tari seni tradisional, lengser dan kegiatan formal lainnya menampilkan pertunjukan seni tari dari mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Djati sendiri,

- Dukungan dari Keluarga besar Ikatan Keluarga Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon juga mengadakan kegiatan seni sebagai dukungan formil kepada mahasiswa melalui lomba-lomba seni Tarian Sajojo, Maumere, seni mendongeng.
7. Perwakilan Bank BJB Kota Cirebon menyampaikan bahwa dalam mendukung Ekraf di Kota Cirebon, Bank BJB memiliki beberapa program, antara lain:
- Program Kredit Mesra dengan *plafond* Rp500.000 s.d Rp5.000.000 tanpa bunga, hanya pembayaran pokok dari 6 bulan s.d 12 bulan. Kredit program dari Pemprov memungkinkan untuk pembiayaan para pelaku Ekraf, baik yang baru merintis usaha maupun yang sudah berjalan, sehingga memudahkan untuk pendampingan dan monitoring oleh perbankan.
 - Kredit program KUR, baik SKIM super mikro (<Rp.10 jt), mikro (Rp.10 jt s.d Rp.100 jt) dan KUR kecil (Rp.100 jt s.d Rp.500 jt), sehingga dengan program pembiayaan yang ada di Bank BKB, para pelaku Ekraf bisa naik kelas mulai dari mesra sampai dengan KUR.
 - Program Pesat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu), yang akan melakukan pembinaan dan meningkatkan kompetensi para pelaku Ekraf agar bisa naik kelas.

B. Permasalahan dan Temuan

Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kunjungan kerja ini yaitu:

1. Menurut Wakil Walikota, satu hal yang dikeluhkan pelaku industri kreatif, utamanya yang masih berupa rintisan adalah belum kondusifnya regulasi, dalam pengertian mengenai kepastian regulasi pusat dan daerah, seperti dalam hal permodalan, hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kolateral dan akses untuk pemasaran produk.
2. Kota Cirebon belum memiliki BLU Ekraf, namun banyak kegiatan kreatif yang berkembang dibawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata maupun Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
3. Dekan FEB Unswagati menyampaikan kendala kampus dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif, utamanya dalam penyediaan SDM kreatif, antara lain: i) Mahasiswa lebih memprioritaskan pendidikan formalnya serta program-program Dikti maupun kementerian yang utama seperti program MBKM magang, pertukaran pelajar, Kewirausahaan, Kampus mengajar, KKN MBKM, serta mendapatkan sertifikasi bidang-bidang kompetensi; ii) Masyarakat belum paham akan pentingnya pendidikan berdasarkan minat dan bakat sehingga Prodi Seni pertunjukan masih kekurangan mahasiswa. Seni masih dianggap pekerjaan nomor dua bagi Sebagian masyarakat/orangtua.

C. Pembahasan

Selama kunjungan kerja di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Wakil Walikota Cirebon serta jajarannya yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain pertemuan tersebut, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI juga melakukan kunjungan lapangan. Dari pertemuan dan kunjungan lapangan, terdapat pandangan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan di Kota Cirebon yang perlu mendapatkan perhatian dan respon dari pemerintah. Selain itu terdapat beberapa hal yang menjadi

catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI, antara lain:

- a. Anggota Komisi X DPR RI yang hadir dalam kunjungan secara umum menyampaikan pandangan dan tanggapan bahwa Cirebon memiliki ciri khas dalam sejarah, kuliner dan budaya. Ketiganya harus dikembangkan, namun harus ada pencatatan HAKI pada kegiatan maupun produk kreatif yang dikembangkan dan dihasilkan. Kota yang baik adalah yang mempertahankan memori kota. Oleh karena itu, Kota Tua Cirebon sangat perlu dikelola dengan profesional dan bekerjasama dengan Pemkab Cirebon serta daerah lain di sekitarnya, karena berhubungan dengan daerah-daerah sekitar tersebut. selain itu, perlu juga dikembangkan bahwa Cirebon itu kota santri, sehingga perlu melibatkan pesantren dalam mengembangkan wisata religi. Perlu ada *tour guide* yang profesional dan menertibkan “kotak amal” pada destinasi wisata religi. Mengenai wisata religi dihatrapkan Kota Cirebon lebih serius melakukan penataan termasuk memberdayakan secara maksimal para pelaku ekrafnya.
Hal terakhir yang ditekankan oleh tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI yaitu agar Pemerintah Kota Cirebon melakukan langkah-langkah untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Ekraf sesuai amanat UU No. 24 tahun 2019 dan PP No.24 tahun 2022. Pembentukan BLU ini akan membantu pelaku Ekraf dalam hal akses permodalan, kekayaan intelektual pelaku Ekraf, dan juga akses pemasarannya.
- b. Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan Ekraf di Kota Cirebon, yang hadir dalam pertemuan kunjungan kerja ini, Deputi Bidang Ekonomi dan Produk Kreatif Kemenparekraf RI, Muhammad Neil El Hilman, menyampaikan bahwa pengembangan ekraf berdasarkan UU 24/2019 dan PP 24/2022 ini, Kota Cirebon kuat dalam kuliner, kriya dan fesyen. Namun, agar semua kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Kota Cirebon tidak bermasalah di kemudian hari, silahkan didaftarkan HAKI-nya, dan terkait ini Kemenparekraf/Baparekraf RI akan siap membantu. Selain itu, hal yang perlu dilakukan dalam regulasi baik UU maupun PP tersebut, adalah pembentukan BLU. Namun jika belum ada, maka perlu dirintis dengan pembentukan UPT. Pembentukan UPT ini akan meningkat jika berkembang menjadi BLU.
- c. Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Djati menyampaikan masukan dan rekomendasi dalam pengembangan ekonomi kreatif, khususnya di Kota Cirebon, antara lain:
 - 1) perlu peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif seni pertunjukan terutama seni, musik dan tari tradisional yang masih kurang fasilitas dan sarana prasarana.
 - 2) mengusulkan, di setiap desa ada tempat untuk pengembangan seni tari dan kesenian lainnya yang belum pernah ada, sehingga anak dan remaja bisa belajar seni.
 - 3) perlu fasilitas seni budaya dan pertunjukan di daerah atau desa-desa yang memiliki potensi ekonomi kreatif seni di Cirebon. Contoh (1) center membatik milik umum/atau Sekolah Komunitas di Trusmi; (2) Center Tarian tradisional Cirebon, tari topeng, dan tari merak dan tari lainnya, ada di Desa Slangit, Desa Gegegsik, Desa plumbon, Desa

- Mertasinga Gunungjati, Keraton, Mandalangan, dan beberapa daerah lainnya.
- 4) Pemerintah perlu mendukung Prodi Pertunjukan yang dibuat oleh Perguruan Tinggi UGJ Cirebon, sebagai wadah seniman dalam mengembangkan ilmu dan berijazah.
 - 5) mengusulkan, Perguruan Tinggi menjadi tempat akreditasi dan kurator, sehingga memudahkan mahasiswa agar memiliki HAKI dengan lebih mudah.
 - 6) Perguruan Tinggi sebagai tempat penyelenggaraan kompetisi seni pertunjukan, seni tari, dan lainnya, sesuai dengan program kementerian.
 - 7) Perguruan Tinggi membutuhkan Gedung Inkubator bisnis bagi laboratorium dan pengembangan peningkatan kapasitas kewirausahaan, UMKM, dan Ekonomi Kreatif, agar lebih optimal dalam mengoptimalkan ekonomi kreatif.
- d. Perwakilan Bank BJB Kota Cirebon juga menyampaikan bahwa regulasi yang dibutuhkan untuk pengembangan Ekraf, adalah regulasi dari Pemkot Cirebon untuk pembentukan sentralisasi perijinan, pembinaan dan pembiayaan, serta ekosistem pemasaran secara *online* yang terkoneksi antar kecamatan, yang memudahkan para penduduk kota Cirebon untuk melakukan transaksi dengan para pelaku Ekraf. Oleh karena itu, Usulan kepada pemerintah adalah adanya insentif untuk perbankan, apabila mencapai presentasi yang ditetapkan dari total portofolio perbankan tersebut untuk pembiayaan Ekraf.
- Adapun pandangan perbankan terhadap HAKI sebagai agunan, yaitu (1) Harus ada kepastian dari regulasi eksternalnya, dalam hal ini pemerintah dan regulator perbankan, salah satunya terkait standar nilai atau valuasi atas nilai ekonomis dari HAKI, baik oleh jasa appraisal atau penetapan dari pemerintah dan standar hukum pengikatan HAKI sebagai agunan kredit; (2) Bank BJB akan mendukung program tersebut apabila telah di selaraskan dengan ketentuan internal pembiayaan di Bank BJB.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan data, permasalahan dan pembahasan yang telah dideskripsikan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemkot Cirebon telah memahami bahwa tantangan Revolusi Industri 4.0 akan dapat dimanfaatkan jika segenap potensi yang dimiliki (potensi pariwisata, budaya, religi, sejarah, dll.), dengan dukungan dan kemampuan sumber daya yang Tangguh dan dikelola dengan berbagai strategi yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pemkot Cirebon telah mengembangkan program wisata kreatif dan program ekonomi kreatif namun tetap harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah sekitarnya, terutama Pemkab Cirebon, sehingga diperlukan peran Pemerintah Provinsi untuk menyatukan visi antar-Pemerintah Daerah tersebut.
2. Perguruan Tinggi telah berusaha dalam membantu pengembangan ekonomi kreatif Kota Cirebon, antara lain melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Salah satu usulan yang disampaikan Perguruan Tinggi adalah perlunya Perguruan Tinggi menjadi tempat penyelenggaraan kompetisi kreatif, sesuai dengan program kementerian sehingga perlu dukungan sarana inkubator bagi

laboratorium pengembangan peningkatan kapasitas kewirausahaan, UMKM, dan Ekonomi Kreatif, agar mampu mengoptimalkan ekonomi kreatif Kota Cirebon.

3. Perbankan telah mendukung pengembangan program Ekraf di Kota Cirebon, antara lain melalui program Program Kredit Mesra, Program KUR, maupun Program Pesat. Perbankan mengusulkan regulasi dari Pemkot Cirebon untuk pembentukan sentralisasi perijinan, pembinaan dan pembiayaan, serta ekosistem pemasaran secara *online* yang terkoneksi antar kecamatan, yang memudahkan para penduduk kota Cirebon untuk melakukan transaksi dengan para pelaku Ekraf. Terkait HAKI sebagai agunan, Perbankan menilai perlunya kepastian dari regulasi eksternal, dalam hal ini pemerintah dan regulator perbankan, terkait standar nilai atau valuasi atas nilai ekonomis dari HAKI, baik oleh jasa appraisal atau penetapan dari pemerintah dan standar hukum pengikatan HAKI sebagai agunan kredit.
4. Pemerintah menyarankan agar semua kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Kota Cirebon tidak bermasalah di kemudian hari, maka perlu didaftarkan HAKI-nya agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Selain itu, disarankan agar Pemkot Cirebon merintis pembentukan UPT bidang ekraf sebagai jembatan menuju dibentuknya BLU Ekonomi Kreatif sebagai perwujudan dari UU 24/2019 dan PP 24/2022.
5. Dalam hal kelembagaan Ekraf, di Kota Cirebon dikelola oleh Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata (Disbudpar); dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selain itu telah dibentuk juga Komite Ekonomi Kreatif Kota Cirebon. Sementara terkait Badan Layanan Umum (BLU) Ekraf, sampai saat ini belum terbentuk.

IV. REKOMENDASI

Dari deskripsi data dan pembahasan serta kesimpulan di atas, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kota Cirebon menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemkot Cirebon dan Pemkab Cirebon, serta daerah sekitarnya, untuk melakukan koordinasi dalam mengembangkan visi ekonomi kreatifnya, sehingga mampu mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimiliki bersama secara maksimal.
2. Komisi X DPR RI mendorong Pemkot Cirebon agar semua kegiatan kreatif yang dilakukan oleh Kota Cirebon tidak bermasalah di kemudian hari, maka perlu didaftarkan HAKI-nya agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.
6. Komisi X DPR RI mendorong Pemkot Cirebon agar merintis pembentukan UPT bidang Ekonomi Kreatif sebagai jembatan menuju dibentuknya BLU Ekonomi Kreatif sebagai perwujudan dari UU 24/2019 dan PP 24/2022.
7. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah agar melibatkan Perguruan Tinggi dalam membantu pengembangan ekonomi kreatif, diantaranya menjadikan Perguruan Tinggi menjadi tempat penyelenggaraan kompetisi kreatif sesuai dengan program kementerian, dengan dukungan sarana inkubator bagi laboratorium pengembangan peningkatan kapasitas kewirausahaan, UMKM, dan Ekonomi Kreatif, agar mampu mengoptimalkan ekonomi kreatif, khususnya di Kota Cirebon.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini disusun, sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Kota Cirebon Jawa Barat dalam rangka pengawasan bidang ekonomi kreatif, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam rapat-rapat dengan pemerintah.

Jakarta, 20 November 2022

Ketua Tim/
Anggota Komisi X DPR RI,

Ttd.

H. Muhamad Nur Purnamasidi
A-316